



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan perekonomian di Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG.**

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 26 (dua puluh enam) Peraturan Daerah Kota Palembang, masing-masing :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengusahaan dan Retribusi Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 25);
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemungutan Biaya Administrasi (Leges) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 26);
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 28);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 41);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Optikal (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Th. 2005 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Toko Obat (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Farmasis yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Asisten Farmasis Muda dan Asisten Farmasis Madya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Perhubungan Udara, Pos & Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Walet (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Kerja Perawat (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Kerja Perawat Gigi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengusaha dan Pengoperasian Beca yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Retribusi Analisa Limbah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 16 SERI C);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

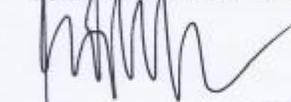
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

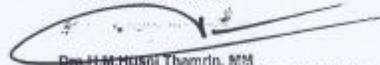
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2011

WALIKOTA, PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4-11-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI E